

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	viii
Abstract	x
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Kerangka Teoritik	29
F.1. Analisis Diskursus dalam Perspektif Pasca-Strukturalis	32
F.2. Prinsip Disensus dan Tawaran Demokrasi Plural Radikal	46
F.3. Identitas dan Subjektivitas dalam Kajian Pasca-Strukturalis	51
F.4. Dimensi Hukum dan HAM sebagai Realitas Diskursif	56
F.5. Kontestasi, Negosiasi dan ‘Hegemoni Temporal’	60
F.6. Rekonsiliasi dan Artikulasi Memori Masa Lalu	65
G. Metode dan Analisis Penelitian	68
H. Sumber Data	71
I. Cara Pengumpulan Data	72
J. Strategi dan Analisis Data	73
K. Pembatasan Ruang Lingkup	79



L. Susunan dan Kerangka Bab Pembahasan	80
--	----

BAB II. KONFIGURASI AWAL DISKURSUS REKONSILIASI 1965 85 **DAN DINAMIKA ARTIKULASINYA**

A. Momen-momen Awal Artikulasi Rekonsiliasi	87
B. Jatuhnya Soeharto dan Embrio Gagasan Rekonsiliasi	97
C. Wacana Integrasi hingga Pengadilan HAM Masa Lalu	115
D. Keadilan Transisi dan Polemik Pelembagaan Rekonsiliasi	136
E. Kompromitas dan Siasat Mendamaikan Elite Politik	145
F. Catatan Penutup	150

BAB III. LANSKAP WACANA ‘TRAGEDI 1965’ PASCA ORDE BARU: 153 **NARASI HEGEMONI DAN DINAMIKA PERUBAHANNYA**

A. Politik Orde Baru dan Pengawetan Narasi Resmi	153
B. Diskriminasi, Represi Ingatan dan Politik Kekerasan	169
C. Kesaksian Korban: Menantang Narasi Dominan	177
D. Narasi Pengakuan dan Kesaksian Para ‘Pelaku’	198
E. FSAB : Rekonsiliasi Elite Anak-anak Korban	208
F. Negosiasi Siasat : Pilihan Politik Struktural hingga Kultural	219
G. Beberapa Rintisan Pendukung dan Modal Rekonsiliasi	234
H. Rekonsiliasi, Media Baru dan Suara Generasi Muda	242
I. Catatan Penutup	256

BAB IV. INSTITUSIONALISASI WACANA REKONSILIASI DAN POLEMIK PEMBENTUKAN KKR 261

A. Respon Dukungan dan Penolakan Ide Pelembagaan KKR	263
B. Rekonsiliasi dalam Lontaran Wacana Fraksi Partai Politik	283
C. Rumitnya Negosiasi Merumuskan ‘Batas Masa Lalu’	292
D. Kontroversi Pasal Impunitas, Amnesti dan Pengampunan	306



E. Resistensi dan Menguatnya Kembali Wacana Anti-Komunis	317
F. Kuatnya Wacana Penolakan hingga Pembatalan KKR	333
G. Inisiasi Siasat Baru untuk Mengatasi Jalan Buntu	345
H. Catatan Penutup	352

BAB V. MEREButKAN IMAJI KEINDONESIAAN, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA 356

A. Rekonsiliasi dan Kontinjensi Wacana: ‘Kemungkinan’ dan ‘Ketidakmungkinan’	359
B. Trauma, Negativitas dan Imaji Identitas Keindonesiaan	368
C. Rekonsiliasi dalam Preferensi dan Negosiasi Keindonesiaan	382
D. Rekonsiliasi dalam Preferensi dan Negosiasi Demokrasi	399
E. Rekonsiliasi dalam Preferensi dan Negosiasi HAM	416
F. Catatan Penutup	430

BAB VI. PENUTUP 435

A. Ringkasan Temuan	435
A.1. Rekonsiliasi 1965 sebagai Siasat Memperebutkan Posisi dan Narasi Hegemonik	436
A.2. Kerangka Nalar Wacana ‘Transisi Politik Demokrasi’ Justru Turut Membatasi Gagasan Rekonsiliasi 1965	442
A.3. Keniscayaan Terbukanya Pluralitas Wacana ‘Rekonsiliasi 1965’ Membutuhkan Militansi Aktif Subjek	448
A.4. Jalan Kompromitas Hanya Siasat Lain dari Peningkaran Rekonsiliasi yang Justru Melanggengkan Politik Impunitas	452
A.5. Lima Pola Kecenderungan Artikulasi Wacana Rekonsiliasi Dengan Berbagai Tautan Rujukannya	457



A.6. Rekonsiliasi: Sebagai Jalan Siasat Menegosiasikan Makna	459
Identitas Masa Lalu dan Legitimasi Politik Masa Depan	
A.7. Perkembangan Teknologi Media Membantu Kemungkinan	462
Munculnya Banyak Siasat bagi Generasi Muda untuk	
Menggerakkan Kerja-karya Pengungkapan Kebenaran Masa Lalu	
 B. Rekomendasi Saran	 464
 DAFTAR PUSTAKA	 473

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AJAR	: Asian Justice and Rights
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
APBD	: Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah
BPD	: Badan Perwakilan Daerah
CGMI	: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia
CIDES	: Center for Information and Development Studies
CSIS	: Center for Strategic and International Studies
DDI	: Dewan Dahwah Islamiyah
DDII	: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah
DKN	: Dewan Kerukunan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
ELSHAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
FFC	: Fact Finding Commission
FRI	: Forum Rektor Indonesia
FSAB	: Forum Silaturahmi Anak Bangsa
G30S	: Gerakan 30 September
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
GPN	: Gerakan Patriot Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICTJ	: International Center for Transitional Justice
IKA	: Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan
IKOHI	: Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia
IPHI	: Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
IPT '65	: International People Tribunal 1965
KKPK	: Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KONTRAS	: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
Kopkamtib	: Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
KWI	: Konferensi Wali Gereja Indonesia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Lemhanas	: lembaga Pertahanan Nasional
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

LKK	: Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Mahmilub	: Mahkamah Militer Luar Biasa
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: Non Government Organization
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdahtul Ulama
NUS	: National University of Singapore
P2D	: Perhimpunan Pendidikan Deemokrasi
Pakorba	: Paguyuban Korban Orde Baru
Panja	: Panitia Kerja
Pansus	: Panitia Khusus
PB NU	: Pengurus Besar Nahdatul Ulama
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perwali	: Peraturan Walikota
PK	: Peninjauan Kembali
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Pemuda Pancasila
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSP	: Pusat Studi Pancasila
PSSAT	: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara
RAHAMDA	: Rancangan Hak Asasi Manusia Daerah
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKAD	: Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat
RUU	: Rancangan Undang-undang
Sekber 65	: Sekretariat Bersama 65.
SKP-HAM	: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia\
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TPU	: Tempat Peristirahatan Umum
UGM	: Universitas Gajah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
UNAIR	: Universitas Airlangga
UNPAD	: Universitas Negeri Padjajaran



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DINAMIKA KONTESIASI DAN NEGOSIASI DISKURSUS REKONSILIASI 1965 PASCA ORDE BARU
ST. TRI GUNTUR NARWAYA, Prof. Dr. Faruk HT; Dr. Budiawan
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Watimpres

YLBHI

YPKP 1965

: Dewan Pertimbangan Presiden

: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

: Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965